

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan agama Islam tidak dapat terlepas dari kegiatan dakwah Islamiyah. Rasulullah SAW diutus ke dunia ini tidak lain, kecuali untuk menyampaikan risalah (dakwah) Islamiyah kepada umatnya. Risalah (ajaran) Rasulullah SAW ini setelah disampaikan kepada umatnya selanjutnya disuruh mendakwahkan kepada orang lain. Setiap orang yang mengaku muslim memikul kewajiban berdakwah Islamiyah kepada sesama manusia. Dengan dakwah Islamiyah inilah agama Islam dapat berkembang dan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Kegiatan dakwah Islamiyah yang telah dirintis dan diperjuangkan oleh Rasulullah SAW tersebut harus dilanjutkan.

Perintah melaksanakan dakwah Islamiyah ini memang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerintahkan kepada umat Islam untuk berdakwah. Kewajiban melaksanakan perintah dakwah ini begitu urgennya sampai-sampai Rasulullah SAW memerintahkan kepada setiap muslim untuk berdakwah sesuai dengan sabda beliau dalam Al-Bukhori (2004 : 636) :

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً.

“Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat”. (Arif Rahman Hakim,

Pada Hadis di atas setiap muslim diperintahkan untuk menyampaikan (dakwah) walaupun hanya mengerti satu ayat saja.

Setelah umat Islam mengalami perkembangan yang pesat, perintah dakwah ini bisa dilaksanakan secara berjamaah dan terorganisasi. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an (Ali Imron ayat 104) :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah dari antara kamu ada segolongan yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (Departemen Agama RI, 2004 : 79).

Pada ayat di atas setiap muslim diperintahkan membentuk sekelompok orang (umat) untuk berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar agar memperoleh kemenangan/kejayaan. Pada ayat ini ditegaskan bahwa umat Islam dalam melaksanakan dakwah supaya terorganisasi secara rapi agar memperoleh kemenangan. Jangan sampai terjadi seperti pepatah : “sesuatu yang haq bila tidak diorganisasi dengan baik akan dikalahkan oleh sesuatu yang bathil yang diorganisasi dengan baik”.

Umat Islam dalam melaksanakan kewajiban dakwah Islamiyah ini dapat dilakukan melalui lembaga formal, non formal maupun informal. Lembaga formal seperti melalui sekolah dan lembaga pemerintah. Lembaga non formal seperti melalui pelatihan-pelatihan dan kursus. Lembaga informal melalui pembinaan dan pendidikan dalam keluarga. Dalam hal ini Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Lanas sesuai dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 (nasal 1

ayat 3) klas II A Yogyakarta masuk ke dalam kreteria lembaga formal karena lembaga ini merupakan lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan dakwah secara berjamaah dan terorganisasi ini, di Lapas klas II A Yogyakarta dilaksanakan pembinaan agama. Pembinaan agama bagi warga binaan Lapas ini dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan. Pembinaan ini secara kasat mata sangat bermanfaat bagi warga binaan yang ada di dalamnya. Akan tetapi secara mendetail apakah betul-betul bermanfaat, materi dan metodenya apakah sudah tepat sasaran perlu diteliti dan dikaji. Selama ini belum pernah diadakan evaluasi terhadap kompetensi pembinaannya dan metode pembinaannya. Begitu juga keberhasilan pembinaan ini belum pernah diadakan evaluasi. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian dan pengkajian lebih lanjut.

Ajaran Islam mendidik setiap muslim agar merencanakan segala sesuatunya untuk bekal hari esok. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an (Al-Hasyr ayat 18) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman ! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbutanya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. Departemen Agama RI (2004 : 799).

Pada ayat ini Allah SWT telah jelas mengajarkan kepada setiap muslim agar dapat merencanakan segala sesuatunya untuk bekal hari esok. Setiap muslim harus mampu merencanakan melaksanakan mengontrol dan mengevaluasi kegiatan

yang dilaksanakan untuk bekal hari esok, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Dengan kata lain kegiatan dakwah itu harus direncanakan terlebih dahulu, dilaksanakan dengan baik, dikontrol pelaksanaannya dan dievaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilannya.

Kegiatan dakwah Islamiyah terutama yang dilaksanakan masyarakat pada umumnya masih kurang terorganisasi dengan baik. Keegiatannya belum direncanakan dengan baik dan berkesinambungan. Begitu juga dengan sistem evaluasinya belum ada tolok ukurnya untuk menilai keberhasilannya. Suatu kegiatan dakwah dianggap berhasil jika dihadiri oleh jamaah yang banyak. Pada hal jamaah yang hadir itu belum tentu dapat melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain bagaimana keberhasilannya belum pernah dievaluasi. Di sini terjadi kesenjangan antara realita yang ada dan idealita yang seharusnya.

Hal yang demikian ini tidak boleh terjadi pada lembaga formal khususnya Lapas klas II A Yogyakarta. Lapas klas II A Yogyakarta sebagai lembaga formal pemerintah seharusnya dalam melaksanakan pembinaan agama (dakwah Islamiyah) ini sudah direncanakan, dilaksanakan, dikontrol dan dievaluasi dengan baik. Dengan demikian dapat diketahui keberhasilannya. Bagaimana realita (kenyataannya) perlu dibuktikan faktanya di lapangan.

Suatu kegiatan sudah seharusnya direncanakan sejak awal sebelum dilaksanakan. Suatu kegiatan yang direncanakan dengan baik sering disebut program. Menurut Suharsimi Arikunto dan Cipi Safruddin Abdul Jabar (2004 : 2-3) program adalah suatu unit/kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi/

implementasi dari suatu kebijakan yang berlangsung dalam proses berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Suatu program setelah direncanakan secara matang baru dilaksanakan. Dalam pelaksanaan program suatu kegiatan tersebut perlu adanya kontrol. Untuk mengetahui keberhasilan program suatu kegiatan diharuskan adanya evaluasi. Begitulah idealnya suatu kegiatan dapat dilaksanakan.

Kenyataannya tidak semua kegiatan sudah direncanakan sejak awal dengan baik sebelum dilaksanakan. Masih ada kegiatan berjalan begitu saja tanpa perencanaan dengan baik. Belum lagi adanya kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut sudah berjalan sesuai dengan rencana atau menyimpang dari rencana. Apa lagi tidak pernah dievaluasi untuk mengetahui keberhasilannya.

Fakta seperti tersebut di atas tidak boleh terjadi bagi umat Islam dalam melaksanakan dakwah Islamiyah. Agama Islam dapat berkembang di dunia ini melalui kegiatan dakwah yang diawali sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang. Agama Islam masuk dan berkembang di Indonesia juga melalui dakwah yang dilakukan oleh para saudagar Arab yang berdagang ke Indonesia sambil berdakwah agama Islam kepada para pedagang yang ditemuinya. Dakwah perorangan dari para saudagar Arab ini semakin hari semakin bertambah pengikutnya. Ibarat pepatah “sambil menyelam minum air”. Mereka bisa melaksanakan perintah dakwah sambil berdagang. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa kewajiban melaksanakan dakwah ini dibebankan kepada setiap orang yang mengaku

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, muncul beberapa permasalahan yang perlu diteliti dan dikaji. Permasalahan itu antara lain perlu adanya evaluasi terhadap materi, kompetensi pembina dan metode pembinaan serta hasil pembinaan agama di Lapas klas II A Yogyakarta. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan agama di Lapas klas II A Yogyakarta ?
2. Apa saja materi pembinaan agama di Lapas klas II A Yogyakarta ?
3. Bagaimana kompetensi para pembina agama di Lapas klas II A Yogyakarta ?
4. Bagaimana hasil pembinaan agama di Lapas klas II A Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini ditinjau secara teoretik dan praktek ialah :

1. Secara teoretik ingin mengetahui apakah pelaksanaan pembinaan agama di Lapas klas II A Yogyakarta sudah direncanakan terlebih dahulu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh warga binaannya. Data yang diperoleh di lapangan akan dianalisis secara mendalam. Jika secara praktek pelaksanaan pembinaannya belum direncanakan, maka diadakan evaluasi agar direncanakan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh warga binaannya.
2. Mengidentifikasi apa saja materi pembinaan agama di Lapas klas II A Yogyakarta. Jika materi pembinaan agama belum sesuai dengan yang dibutuh-

kan oleh warga binaannya, maka akan dievaluasi dan disesuaikan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh warga binaannya.

3. Menganalisis kompetensi para pembinanya. Apabila kompetensi pembinanya belum memenuhi, maka perlu ditingkatkan kompetensi pembinanya.
4. Mengevaluasi apakah keberhasilan yang telah dicapai itu sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau belum.

Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak yang berkompeten agar materi/isi pembinaan agama di Lapas klas II A Yogyakarta dapat direncanakan terlebih dahulu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh warga binaannya.
2. Memberi masukan kepada para pembina agama Lapas klas II A Yogyakarta untuk meningkatkan kompetensinya dalam melakukan pembinaan dengan metode yang tepat sasaran.
3. Menambah khasanah kepustakaan ilmu psikologi pendidikan yang dapat digunakan sebagai informasi bagi yang berminat meneliti lebih lanjut.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran referensi hasil penelitian terdahulu tentang pembinaan narapidana ditemukan empat hasil penelitian. Dua hasil penelitian tesis dan dua hasil penelitian skripsi. Pertama, hasil penelitian Suryawan Raharjo "Sistem Pemasarakatan Sebagai Konsep Integral Dalam Pola Pembinaan Naranidana Pada Lembaga Pesvarakatan. Studi Pada Lembaga Pemasarakatan

Klas II A dan Klas II B di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2009". Penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana implementasi sistem pemasyarakatan sebagai konsep integral dalam melaksanakan pola pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Kedua, hasil penelitian Tri Ari Astuti "Dampak Pembinaan Terhadap Peningkatan Keberagaman Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, 2009". Penelitian ini lebih menitik beratkan pada bagaimana dampak pelaksanaan pembinaan terhadap peningkatan keberagaman narapidana di lembaga pemasyarakatan klas II A Yogyakarta. Peningkatan keberagaman di sini sesuai dengan agama narapidana tersebut, tidak hanya yang beragama Islam saja. Ketiga, hasil penelitian Agus Suciawan "Upaya Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dan Rohani Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Guna Mewujudkan Tujuan Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, 2009". Penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana upaya lembaga pemasyarakatan klas II A Yogyakarta ini memberikan pelayanan kesehatan dan rohani bagi narapidana. Keempat, hasil penelitian Zulfitri Prita Dewi "Hubungan Antara Kecerdasan Spiritual Dengan Penyesuaian Sosial Pada Narapidana Baru Di Lembaga Pemasyarakatan Wates, 2010". Penelitian ini menitik beratkan pada hubungan antara kecerdasan spiritual dengan penyesuaian sosial. Semakin tinggi kecerdasan spiritual, semakin mudah dalam menyesuaikan diri.

Adapun penelitian ini lebih banyak menilai/mengevaluasi dari aspek materi pembinaan, kompetensi pembina, proses (metode) pembinaan dan hasil yang telah dicapai dalam pembinaan agama di Lapas klas II A Yogyakarta apakah

sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Penelitian ini akan menyoroti apakah meteri pembinaannya sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Kompetensi pembinanya apakah sudah memenuhi kebutuhan yang ada. Proses (metode) pembinaannya apakah sudah tepat sasaran dan bagaimana respon dari warga binaannya. Di samping itu, juga akan menelaah hasil evaluasinya. Dengan demikian penelitian ini belum pernah ada yang melaksanakan dan ini berarti masih murni.

E. Landasan Teori

1. Evaluasi

Pengertian evaluasi Menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2004 : 1-2) adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi itu digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam menentukan sebuah keputusan. Jadi evaluasi program ialah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna mengambil keputusan.

2. Materi/Isi Pembinaan Agama

Materi/isi pembinaan agama yang dimaksud di sini adalah materi/isi pembinaan agama Islam bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas II A

Yogyakarta. Materi/isi pembinaan agama di sini lebih memfokuskan pada bagaimana materi pembinaan agama itu disampaikan kepada warga binaan. Materi/isi pembinaan agama di sini meliputi : ceramah/kuliah tujuh menit (kultum) agama, membaca Al-Qur'an (Iqro' dan tadarus Al-Qur'an), kajian fiqih dakwah, kajian akhlaq dan kesenian Islami (seni baca Al-Qur'an/qiro'ah dan hadroh). Adapun pembinaanya berasal dari Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Pakualaman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Yogyakarta, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Muhsin Yogyakarta, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) kota Yogyakarta dan pondok pesantren.

Adapun Lapas yang dimaksud di sini adalah lembaga pemasyarakatan klas II A yang beralamatkan di jalan Tamansiswa nomor 6 Yogyakarta. Penelitian ini memilih di Lapas klas II A Yogyakarta dengan alasan antara lain. Pertama, selama ini belum ada yang mengadakan penelitian tentang materi/isi pembinaan agama yang dilaksanakan di Lapas ini. Alasan yang kedua, kompetensi pembinaanya juga belum pernah diadakan evaluasi. Alasan ketiga, metode pembinaannya apakah sudah tepat atau belum juga belum pernah dianalisis.

3. Model Pembinaan Agama

Lapas merupakan tempat proses pembinaan narapidana yang lazim disebut *therapeutics process*. Lapas sebagai *therapeutics process* bertujuan menyembuhkan penyakit para narapidana yang ada di dalamnya. Yakni penyakit kesesatan hidup para narapidana yang disebabkan adanya kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya sehingga berbuat melanggar hukum. Lapas dalam melaksa-

nakan pembinaan ini berdasarkan asas : pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 (Pasal 5). Dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 (pasal 1 ayat 1) lebih lanjut ditegaskan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Konsep pembinaan di Lapas ini menurut penjelasan Undang undang No. 12 tahun 1995, narapidana bukan dijadikan sebagai obyek saja, melainkan juga sebagai subyek seperti manusia pada umumnya yang sewaktu-waktu dapat berbuat kesalahan/khilaf yang bisa dikenakan pidana. Orang yang sedang menjalani pidana (narapidana) itu tidak harus dibinasakan orangnya, melainkan faktor-faktor yang menyebabkan narapidana itu melanggar hukum, norma, kesusilaan maupun agama. Pembinaan ini berdasarkan pasal 2 Undang Undang No. 12 tahun 1995 secara umum bertujuan menjadikan manusia seutuhnya. Para narapidana ini dibina sedemikian rupa agar segera menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya dengan memantapkan iman (ketahanan mental) sehingga mampu berinteraksi dengan sesama narapidana dan masyarakat luas setelah menjalani pidananya.

Adapun secara khusus pembinaan ini bertujuan agar para narapidana :

- 1) Berhasil memantapkan kembali harga diri, kepercayaan diri dan sikap optimis-nya menghadapi masa depannya.
- 2) Berhasil memperoleh pengetahuan, keterampilan untuk bekal hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- 3) Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib, disiplin dan mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
- 4) Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Pada pasal 5 Undang Undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- 1) Pengayoman, yaitu perlakuan terhadap narapidana dalam melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan dan memberikan bekal kepada narapidana agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.
- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan, yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada narapidana tanpa membeda-bedakan orang.
- 3) Pendidikan dan pembimbingan, yaitu penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah

- 4) Penghormatan harkat dan martabat manusia bahwa sebagai orang yang tersekat narapidana harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- 5) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, yaitu narapidana harus berada dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di lembaga pemasyarakatan narapidana tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia. Dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga atau rekreasi.
- 6) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, yaitu bahwa walaupun narapidana berada di lembaga pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dengan masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga, seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Selanjutnya pada pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan disebutkan bahwa pembinaan ini dibagi menjadi dua yaitu pembinaan kenibadian dan

- a) Pembinaan kesadaran beragama, yaitu memperteguh keimanan dan penyadaran terhadap perbuatan yang benar dan yang salah. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu penyadaran untuk menjadi warga negara yang baik, berbakti bagi bangsa dan negaranya yang merupakan manifestasi dari iman dan taqwa.
- b) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), yaitu pembinaan melalui pendidikan formal seperti kejar paket A maupun non formal seperti keterampilan usaha sesuai yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pendidikan non formal yang mudah dan murah adalah melalui ceramah umum dan membuka informasi seluas-luasnya dari luar melalui koran/majalah, radio, televisi dan sebagainya.
- c) Pembinaan kesadaran hukum, melalui penyuluhan hukum yang bertujuan menyadarkan narapidana terhadap hak dan kewajibannya dalam menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat hukum. Dengan kata lain membentuk keluarga yang sadar hukum (KADARKUM).
- d) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat yang merupakan pembinaan kehidupan kemasyarakatan yang bertujuan supaya mantan narapidana itu mudah diterima kembali oleh masyarakat/lingkungannya. Untuk mencapai ini para narapidana terus-menerus dibina agar patuh beribadah dan kegiatan sosial secara gotong-royong sehingga pada saatnya kembali pada masyarakat/lingkungannya dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakatnya.

2) Pembinaan kemandirian yang terdiri :

- a) Pembinaan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin, reparasi alat-alat elektronik dan sebagainya.
- b) Pembinaan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, seperti pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi/jadi, misalnya mengolah bambu menjadi perabotan rumah tangga, pengelolaan produksi makanan ringan, dan sebagainya.
- c) Pembinaan keterampilan sesuai minat dan bakat para narapidana, misalnya dalam bidang seni disalurkan pada perkumpulan seniman untuk dikembangkan sekaligus memperoleh nafkah.

Pembinaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial itu telah diatur dalam Undang Undang nomor 12 tahun 1995 yang meliputi :

- 1) Asimilasi, yaitu proses pembinaan narapidana dengan membaurkan ke dalam kehidupan masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat. Tujuan asimilasi menurut pasal 6 Keputusan menteri Kehakiman RI nomor M.1 PK 04-10 tahun 1999 tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas adalah membangkitkan/meningkatkan pendidikan dan keterampilan narapidana untuk hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat setelah bebas

2) Reintegrasi sosial, yaitu pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas. Pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan syarat kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya yang sekurang-kurangnya selama 9 (sembilan bulan). Cuti bersyarat yaitu pemberian cuti dengan beberapa syarat kepada narapidana yang masa pidananya selama antara 8 (delapan) sampai dengan 1 (satu) tahun. Selanjutnya cuti menjelang bebas ialah pemberian cuti kepada narapidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan bulan).

Proses pembinaan ini membutuhkan sarana dan prasarana pendukung yang meliputi :

1) Gedung pemasyarakatan yang merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya. Gedung pemasyarakatan ini sebagian besar merupakan warisan kolonial Belanda yang infrastrukturnya terkesan keras dengan tembok tinggi dan teralis besi. Status tanahnya adalah hak pinjam pakai dari kraton Yogyakarta dengan luas seluruhnya 38.579 m^2 . Luas bangunan kantor $543,50 \text{ m}^2$, luas bangunan blok $2.846,92 \text{ m}^2$ dan luas sarana lainnya $10.332,36 \text{ m}^2$ (data kepegawaian Lapas klas II A Yogyakarta pada 9 Desember 2013). Sarana pendidikan keterampilannya yang tersedia antara lain pertukangan kayu, las, pembuatan keset, handycraft, sablon, menjahit, laundry dan potong rambut.

2) Petugas pembina khususnya yang berasal dari Lapas itu sendiri yang sebagian besar belum memiliki bekal kecakapan yang cukup dalam melakukan pem-

binaan dengan pendekatan humanis yang menyentuh perasaan para narapidana dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan. Petugas pembina yang berasal dari internal Lapas lebih terfokus pada pengamanan dan penegakan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya dibentuk tim pengamat masyarakat (TPM) yang bertugas memberi saran mengenai program pembinaan bagi warga binaan dan sanksi bagi yang melanggar tata tertib. Susunan tim TPM terdiri dari ketua : Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan Narapidana; sekretaris : Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Bimbingan Masyarakat dan Perawatan (Bimaswat); anggota : Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Masyarakat (KPLP); Kasubsi Keamanan; Kasi Kegiatan Kerja; Dokter Lapas; Kasi Administrasi, Keamanan dan Ketertiban (Adm Kamtib); Wali Masyarakat; Kasubsi Registrasi; Petugas Balai Masyarakat (Bapas); Kasubsi Bimbingan Kerja dan Hasil kerja (Bimker dan Haker). Tim TPM ini bersidang secara rutin dijadwalkan 2 kali dalam 1 bulan dan secara insidental bila diperlukan karena ada kepentingan yang mendesak. Tugas pokok TPM ialah memberikan pertimbangan kepada Kepala Lapas mengenai : bentuk pembinaan, usulan asimilasi, usulan program integrasi pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas bagi warga binaan dan bentuk sanksi bagi yang melanggar tata tertib.

Pada pasal 4 Peraturan Pemerintah no. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan masyarakat disebutkan bahwa pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh petugas pembina masyarakat yang terdiri pembina masyarakat, pengamanan dan pembimbing. Dalam melaksanakan pembinaan ini

kepala Lapas menetapkan petugas yang menjadi wali bagi narapidana. Di samping itu, juga melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait, lembaga kemasyarakatan maupun perorangan. Pembinaan ini ada tiga tahap yang harus dilalui. Pertama, pembina meneliti segala hal ihwal narapidana mengapa melakukan pelanggaran. Pembinaan ini dilaksanakan saat narapidana menjalani pidananya selama $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari masa pidananya dengan pengawasan maksimum. Kedua, setelah narapidana telah menjalani pidananya selama $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari masa pidananya dan menunjukkan keinsyafan, perbaikan diri, disiplin dan taat tata tertib, kepadanya diberikan kebebasan yang lebih dengan pengawasan medium. Kemudian setelah narapidana menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya, kepadanya diberikan hak asimilasi. Ketiga, setelah narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya, kepadanya diberikan hak cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat yang pembinaannya dilaksanakan di luar Lapas dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap berikutnya ini ditetapkan melalui sidang TPP berdasarkan data dari pembina pemasyarakatan, pengaman, pembimbing dan wali narapidana.

Pada bab XI pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang Undang Dasar (UUD) 1945 disebutkan bahwa hak memeluk agama dan beribadat menurut keyakinannya merupakan salah satu hak dasar rakyat yang dijamin oleh negara. Agama yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis, terutama sebagai landasan spiritual, moral dan etika. Agama dan masyarakat saling berkaitan, baik dalam kehidupan

pribadi maupun sosial. Agama berfungsi sebagai pedoman dan sumber untuk mengatur norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam praktek kehidupan sehari-hari menurut Jalaludin (208 : 299-301) agama berfungsi sebagai berikut :

- a) Fungsi edukatif, yaitu memberikan ajaran yang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati bagi pemeluknya.
- b) Fungsi penyelamat, yakni ajaran agama dapat menunjukkan jalan/memberikan keselamatan, baik di dunia ini maupun di akherat kelak.
- c) Fungsi kedamaian, ialah agama mengajarkan bahwa orang yang berdosa karena perbuatan melawan hukum (agama) akan segera diampuni setelah melakukan *taubatan nasuha*. Orang yang berdosa akan mengalami kedamaian bathin setelah mendapat pengampunan.
- d) Fungsi sosial kontrol, adalah ajaran agama dijadikan sebagai norma yang mengontrol kehidupan sosial, baik secara individu maupun kelompok sosial masyarakat.
- e) Fungsi solidaritas, yakni para penganut agama itu secara psikologis merasa seiman dan seperjuangan, sehingga muncul rasa persaudaraan/solidaritas dalam kelompok agamanya.
- f) Fungsi transformatif, yaitu ajaran agama dapat mengubah kepribadian bagi penganutnya menjadi kehidupan baru yang sesuai dengan agama yang dianutnya.

- g) Fungsi kreatif, ialah ajaran agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk bekerja keras dan produktif, baik untuk kepentingan individu maupun sosial.
- h) Fungsi sublimatif, adalah ajaran agama itu memberikan kebebasan bagi pemeluknya untuk melakukan usaha apa saja asalkan tidak bertentangan dengan norma agama yang dianutnya.

Menurut Mukti Ali (1978 : 51-54) peranan pembinaan agama dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan antara lain :

- 1) Agama sebagai motivasi, yaitu ajaran agama yang diyakini secara mendalam menjadi semangat untuk mengejar tingkat kehidupan yang lebih baik. Keyakinan ini menjadi semangat untuk selalu berpartisipasi dalam meningkatkan mutu kehidupan yang lebih baik tanpa mengharapkan imbalan berupa materi semata, melainkan lebih mengutamakan balasan pahala dari Tuhannya.
- 2) Agama sebagai etos pembangunan, yakni ajaran agama yang diyakini dan dihayati secara mendalam oleh penganutnya mampu memberikan nilai moral dalam sikap yang memberikan garis pedoman tingkah lakunya dalam bertindak sesuai dengan ajaran agamanya. Segala yang dilarang agama dijauhi dan yang diperintah dilaksanakan, baik untuk kepentingan pribadi maupun umum. Tingkah laku dan sikap yang demikian ini akan membentuk akhlaq yang mulia dan terbinanya kebiasaan yang agamis.

Permasalahan yang mendasar adalah rendahnya kualitas pengetahuan, pemahaman dan pengamalan terhadap ajaran agamanya. Hal ini terbukti masih banyaknya perbuatan kriminalitas, perjudian, perilaku asusila, peredaran dan

penyalahgunaan narkoba, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di kalangan penyelenggara negara yang dewasa ini semakin merajalela. Di sinilah pentingnya fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral. Banyaknya perbuatan yang melanggar hukum dan agama ini menjadikan banyak orang yang menjadi narapidana menghuni Lapas. Dalam hal ini fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral spiritual dan etika dalam kehidupan bermasyarakat merupakan pondasi awal bagi Lapas dalam melaksanakan pembinaan terpadu bagi narapidana. Dengan demikian diharapkan para narapidana setelah dibina mampu menjadikan agama sebagai sistem nilai yang harus dipahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Abdul Aziz Ahyadi (1995 : 37) sikap mental yang memiliki kesadaran dalam beragama meliputi : pengalaman ketuhanan, keimanan, sikap dan tingkah laku yang terorganisasi dalam sistem mental dari kepribadian. Kesadaran agama itu menurut Saifudin Azwar (1998 : 23-28); dan Mar'at (1981 : 73-76) mencakup aspek kognitif, afektif dan konatif. Aspek kognitif merupakan representasi dari apa yang dipercayai. Aspek afektif merupakan perasaan individu terhadap obyek sikap dan emosi yang mengakar paling dalam dan relatif tahan dari pengaruh negatif. Selanjutnya aspek konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku sesuai dengan sikap (afektif) yang dimilikinya. Dalam kehidupan sehari-hari ketiga aspek ini sulit dipisahkan, karena merupakan suatu sistem kesadaran beragama yang utuh dalam kepribadian seseorang.

Jika nilai-nilai agama dijadikan sebagai pandangan hidup, maka sikap keberagamaan diperlihatkan sebagai identitas dan kepribadian. Sikap keberaga-

maan seperti ini menjadikan lebih mantap dalam menjalankan ajaran agama dan cenderung fanatik. Sebaliknya bila memilih nilai-nilai yang bersumber dari non agama yang dijadikan sebagai pandangan hidup, maka akan memunculkan kecenderungan sikap yang anti agama. Apa lagi bila menemui hal-hal yang kurang dapat difahami menurut akal sehat (*common sense*). Sikap anti agama seperti ini menurut Jalaluddin (2008 : 106-107) tidak jarang diperlihatkan dalam bentuk tindakan memusuhi agama yang dinilainya membelenggu dan bersifat dogmatis. Oleh karena itu sikap keberagamaan yang memiliki perspektif luas ini harus dilakukan pendalaman pengertian dan perluasan pemahamannya.

Kreteria kemantapan kesadaran beragama tidak dapat dilepaskan dari kriteria kematangan kepribadian. Kesadaran beragama yang mantap hanya terdapat pada orang yang memiliki kepribadian yang matang. Menurut Gilbert Sax (1980 : 493-494) dalam bukunya yang berjudul *Principles of Educational and Psychological Measurement and Evaluation* ada beberapa karakteristik (dimensi) dari sikap itu, yaitu : arah, intensitas, keluasan, konsistensi dan spontanitas.

a) Arah, ialah sikap itu terpilah pada dua arah : setuju atau tidak setuju, mendukung atau tidak mendukung, mengikuti atau tidak mengikuti. Dalam pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh petugas Lapas akan terlihat mana narapidana yang mengikuti dan memahami, mana yang tidak mengikuti dan tidak memahami.

b) Intensitas, yaitu kedalaman atau kekuatan sikap terhadap sesuatu itu belum tentu sama walaupun arahnya mungkin tidak jauh berbeda. Intensitas ini merupa-

kan cerminan kedalaman pemahaman agama yang dijadikan obyek pembinaan di Lapas. Sikap keberagamaan narapidana ini dapat diukur dari intensitas rutinitas ibadah yang dilakukannya.

- c) Keluasan, yakni sikap itu memiliki keluasan pemahaman terhadap obyek tertentu yang spesifik. Dalam hal ini ada narapidana yang memiliki pemahaman yang mendalam dan spesifik terhadap ajaran agama yang diterapkan di Lapas, sehingga setelah selesai menjalani masa tahanannya bisa menjadi ustadz dan mendirikan pondok pesantren.
- d) Konsistensi, ialah sikap itu mempunyai kesesuaian antara pernyataan dengan respon terhadap obyek tertentu. Konsistensi sikap ini dapat dilihat melalui kesesuaian sikap dari waktu ke waktu yang bertahan pada diri individu dalam waktu yang relatif lama. Sikap konsistensi narapidana yang bertaubat akan terlihat dari rutinitas ritual dan pemahaman keagamaan dari waktu ke waktu (saat menjalani pidana sampai bebas).
- e) Spontanitas, yaitu sikap itu dapat dinyatakan secara spontan. Di sini narapidana dinyatakan berhasil dalam pembinaannya setelah mampu menyatakan sikap dalam banyak hal, termasuk tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan agama dan hukum. Dalam bahasa agama disebut akhlaq yang baik. Akhlaq itu munculnya reflek dan spontan tanpa perlu difikir dan dicerna terlebih dahulu oleh akal.

Menurut Gordon Willliart Allport (1967 : 53-54) ada tiga ciri kepribadian yang matang dalam kesadaran beragama yakni sebagai berikut :

- a) Berkembangnya kebutuhan sosial psikologis ruhaniah dan arah minat yang menuju pada pemuasan ideal dan nilai-nilai sosial budaya yang dapat melampaui kebutuhan biologis (hawa nafsu).
- b) Mampu mengintrospeksi, merefleksikan diri, memandang diri sendiri secara obyektif dan kemampuan memahami arti hidup dan kehidupan ini. Kemampuan mengenal diri sendiri (jati diri) ini dapat menempatkan diri sendiri dalam hubungan dengan orang lain, masyarakat dan alam semesta (lingkungan).
- c) Memiliki kesadaran dalam beragama sehingga selalu mempunyai kepribadian yang utuh, baik yang diperoleh dari filsafat agama maupun yang lainnya.

Kepribadian yang matang menurut Abdul Aziz Ahyadi (1997 : 50-60) adalah kepribadian yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Bersikap diferensiasi yang baik, yaitu selalu menghormati/menghargai orang lain.
- b) Mempunyai motivasi kehidupan beragama yang dinamis.
- c) Melaksanakan ajaran agama secara konsisten dan produktif.
- d) Pandangan hidupnya komprehensif.
- e) Mempunyai pandangan hidup yang integral.
- f) Memiliki semangat yang tinggi dalam pencarian dan pengabdian kepada

Sikap keberagamaan pada orang dewasa menurut Jalaluddin (2008 : 107)

memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut :

- a) Menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang bukan sekedar ikut-ikutan.
- b) Norma agama itu bersifat realistik, sehingga harus lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku.
- c) Norma dan ajaran agama itu selalu positif, sehingga harus dipelajari dan diperdalam pemahamannya.
- d) Ketaatan kepada agama dilakukan berdasarkan pertimbangan yang matang dan tanggung jawab, sehingga merupakan realisasi dari sikap hidup.
- e) Bersikap terbuka dan berwawasan luas.
- f) Bersikap kritis terhadap materi ajaran agama, sehingga kemantapan beragama tidak didasarkan pertimbangan pikiran saja, tetapi juga pertimbangan hati nurani.
- g) Sikap keberagamaan itu cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing, sehingga berpengaruh dalam menerima, memahami dan melaksanakan agama yang diyakininya.
- h) Sikap keberagamaan dan kehidupan sosial saling berkaitan, sehingga berkembanglah perhatian terhadap kepentingan keagamaan dan organisasi sosial

Tingkat keberagaman peserta binaan Lapas ini dapat diukur dari beberapa aspek, antara lain, pertama : aspek pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai agama yang merupakan kunci berhasil tidaknya pelaksanaan pembinaan. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai agama berdampak positif bagi perkembangan kejiwaan, sehingga dalam implementasinya memunculkan ketekunan, rutinitas, konsistensi dalam beribadah dan pergaulan yang baik. Kedua : aspek ketekunan warga binaan dalam beribadah. Jika semakin tekun warga binaan dalam beribadah, maka semakin berhasil pembinaan yang dilaksanakan. Ketiga : aspek perilaku warga binaan dalam mengikuti pembinaan dan dalam kehidupan bermasyarakat. Bila perilaku warga binaan semakin baik, maka ini mengindikasikan keberhasilan warga binaan tersebut dalam memahami tata cara bergaul dengan sesama warga binaan dan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan agama.

4. Metode Penyampaian Materi Pembinaan Agama

Metode penyampaian materi pembinaan agama itu beraneka ragam. Metode ini antara lain metode ceramah, dialog, demonstrasi/praktek dan metode diskusi. Metode ceramah, yaitu penyampaian materi pembinaan agama kepada peserta didik (peserta binaan) melalui uraian secara lisan (lihat Zuhairini Dkk, 1983 : 83; Zakiah Daradjat Dkk, 2008 : 289; I. L. Pasaribu dan B. Simandjuntak, 1982 : 18). Metode dialog/tanya-jawab, adalah metode pembelajaran kepada peserta binaan dengan jalan pembina bertanya dan peserta binaan menjawab atau sebaliknya (lihat Zuhairini Dkk, 1983 : 86). Metode demonstrasi, ialah pengajaran

menirukan, seperti wudhu dan sholat (lihat Zuhairini Dkk, 1983 : 94). Adapun metode diskusi merupakan proses belajar-mengajar dengan cara saling memberikan pendapat (berdiskusi) antara pendidik dan peserta didik terhadap suatu topik yang akan dipelajari (lihat Zuhairini Dkk, 1983 : 89; dan Zakiah Daradjat Dkk, 2008 : 292).

Metode ceramah sejak jaman dahulu kala sampai sekarang masih banyak dan sering dipakai. Dalam metode ini pendidik/pembina lebih banyak yang aktif, sedangkan peserta didik/binaan kurang aktif. Apa yang disampaikan oleh penceramah/pembina dianggap benar oleh pendengar/binaan tanpa diteliti lebih lanjut. Metode ini sangat cocok digunakan untuk menerangkan pendidikan agama seperti tauhid atau keimanan yang tidak dapat diterangkan dengan metode peragaan. Dalam menerangkan masalah ketauhidan walaupun peserta binaan bersikap pasif tidak menjadi masalah.

Setiap metode pendidikan/pengajaran masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan (lihat Zuhairini Dkk, 1983 : 83-95; dan Zakiah Daradjat Dkk, 2008 : 289-298). Kelebihan metode ceramah antara lain adalah dapat menyampaikan bahan/materi yang banyak dan kepada orang banyak dengan waktu yang relatif singkat. Dalam penggunaan waktu lebih fleksibel, bila waktunya panjang materinya dapat disampaikan lebih banyak dan mendalam. Sebaliknya jika waktunya pendek materinya dapat dipersingkat, diambil yang pokok dan penting saja. Adapun kelemahannya antara lain ialah bila penceramah kurang memperhatikan aspek psikologis dan didaktis dari pendengarnya, maka ceramahnya bisa nge-

lantur ke mana-mana. Begitu juga jika caramahnya lebih banyak humor, maka dapat mengaburkan inti dan isi ceramah.

Kemudian untuk memenuhi kekurangan metode ceramah, dapat dipergunakan metode dialog. Metode dialog ini sangat baik dipergunakan untuk mengetahui pemahaman peserta binaan tentang materi yang telah disampaikan dan melatih untuk mengungkapkan kembali sesuai dengan pemahamannya. Apabila pemahaman peserta binaan masih menyimpang/keliru, maka dapat segera diluruskan/dibetulkan. Jika peserta binaan masih banyak yang belum memahami materi yang telah disampaikan, maka materi tersebut dapat diterangkan lagi. Keunggulan metode dialog ini antara lain yaitu peserta binaan dapat lebih aktif menyampaikan pendapatnya dan menanyakan tentang materi yang belum difahaminya. Adapun kekurangannya antara lain yakni dalam menyampaikan materi lebih lambat dibandingkan dengan metode ceramah. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka penyelesaiannya membutuhkan waktu yang panjang.

Metode demonstrasi/peragaan sangat tepat digunakan untuk menyampaikan materi yang memerlukan peragaan/praktek seperti tata cara wudhu dan sholat. Dalam melaksanakan metode ini pembina sebaiknya memberikan contoh peragaan yang benar kemudian peserta binaan dimohon mempraktekkan kembali. Metode ini dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan suatu proses pendidikan/pembinaan. Tujuan pembinaan yang utama adalah peserta binaannya dapat terampil mempraktekkan ilmu yang diterimanya. Dengan kata lain aspek psikomotorik mendapatkan penekanan lebih dibanding aspek kognitif dan afektif. Kehebatan

metode demonstrasi ini antara lain ialah materi yang disampaikan akan lebih mudah tertanam dalam jiwa dan mudah diingat peserta binaan, karena mereka mengalami dan melakukannya secara langsung. Adapun kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang panjang dan sarana prasarana pendukung.

Metode diskusi sangat cocok digunakan dalam proses pembelajaran yang memerlukan pemecahan masalah (*problem solving*). Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang pasti memiliki masalah yang harus dicari jalan kelurannya. Metode ini sangat baik untuk merangsang peserta didik untuk bersikap aktif dan berfikir kritis dalam memecahkan suatu masalah. Kelebihan metode ini yakni peserta didik dilatih untuk aktif mengemukakan pendapatnya secara sistematis dan berusaha mempertahankannya dengan argumentasi yang tepat di hadapan peserta diskusi. Adapun segi negatifnya yaitu peserta didik harus dibentuk dalam kelompok yang jumlahnya relatif sedikit/kecil dan tidak bisa dalam jumlah yang banyak/besar. Jika peserta didiknya belum terlatih, maka diskusi menjadi pasif dan sulit berjalan dengan baik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan deskriptif kualitatif dengan pendekatan *paedagogik*/ilmu mendidik (lihat M.J. Langeveld, 1949 : 11-12; dan W. D. Commins dan Barry Eagin 1954 : 30). Menurut Lexi J. Moleong (2002 : 4)

penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian seperti ini menurut Suharsimi Arikunto (2010 : 36-37) bisa disebut juga penelitian tindakan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lapas klas II A Yogyakarta yang beralamatkan di jalan Tamansiswa nomor 6 Yogyakarta. Pemilihan tempat penelitian ini dengan pertimbangan, karena Lapas ini telah melaksanakan pembinaan agama bagi warga binaannya. Dalam melaksanakan pembinaan agama bagi warganya, Lapas ini belum pernah mengevaluasi materi/isi pembinaannya, metode pembinaannya, kompetensi pembinanya dan hasil binaannya.

3. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah warga binaan dan pembina Lapas klas II A Yogyakarta. Oleh karena warga binaan ini relatif banyak, maka diambil sampel dengan menggunakan *purposive sampling*, yakni metode pengambilan sampel sesuai dengan tujuan tertentu.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini ialah penelitian evaluasi. Pelaksanaan metode evaluasi ini menurut Winarno Surachmad (1968 : 112) tidak hanya sampai pengumpulan dan penyusunan data saja, melainkan meliputi analisis dan interpretasi arti data itu

Penelitian ini menurut Suharsimi Arikunto (2010 : 36-37) bisa juga disebut penelitian evaluatif.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi non partisipan dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data memakai cara wawancara dengan warga binaan dan pembina serta mengumpulkan catatan dokumen di Lapas kelas II A Yogyakarta. Tipe pertanyaan yang dipakai adalah pertanyaan terbuka, yakni menurut Marzuki (1982 : 67) responden diberi kebebasan dalam menjawab dan menyatakan ide-ide yang dianggapnya tepat. Adapun dalam pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel sesuai dengan klasifikasi yang dibutuhkan. Klasifikasi ini antara lain variasi kasus, jenis kelamin, lama tidaknya hukuman, status ekonomi dan pendidikan. Menurut Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2004 : 84) metode *purposive sampling* digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Metode pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara secara langsung sesuai kebutuhan dalam pengumpulan data. Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki, lihat Lexi J. Moleong (2002 : 105). Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh melalui interview dan observasi. Metode ini juga dapat digunakan untuk mengetahui data peristiwa yang telah berlalu dan sebagai bahan pembandingan terhadap data yang telah diperoleh.

6. Analisis Data

Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yang lebih menekankan pada esensi dari fenomena yang diteliti. Kebenaran dari hasil analisis penelitian kualitatif bersifat jelas seperti keadaan yang sebenarnya (*ideographik*) dan tidak dapat digeneralisasi. Hasil analisisnya bersifat membangun, mengembangkan, meningkatkan maupun menemukan teori sosial. Data yang diperoleh merupakan data secara kualitatif. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Semua data yang terkumpul setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah kemudian direduksi dengan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga agar tetap berada di dalamnya. Selanjutnya data disusun dalam satuan-satuan dan katagorisasi, lihat Lexi J. Moleong (2002 : 103) dan Noeng Muhadjir (1996 : 105). Katagorisasi ini berdasarkan namanya, fungsinya atau kreteria yang lain. Langkah terakhir adalah menafsirkan atau memberikan makna terhadap data itu. Oleh karena data yang diperoleh merupakan data kualitatif, maka data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan dua cara : analisis secara deskriptif dan kualitatif.

a. Analisis Secara Deskriptif

Pada hakikatnya setiap penenelitian memiliki sifat deskriptif dan analitik yang merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian. Berdasarkan hasil pengamatan empiris didapatkan data bahwa sebagian besar laporan penelitian dila-

kukan dalam bentuk deskriptif. Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik obyek dan subyek yang diteliti secara tepat, obyektif dan apa adanya sesuai dengan fakta di lapangan. Pelaksanaan metode analisis deskriptif ini sangat berguna untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan/pembinaan maupun fenomena tingkah laku manusia. Metode analisis deskriptif ini bentuknya sangat sederhana dan mudah dipahami tanpa memerlukan tehnik statistik yang kompleks.

Pelaksanaan metode analisis deskriptif ini tidak terbatas hanya pada pengumpulan dan penyusunan data saja, melainkan meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut (lihat Winarno Surachmad, 1968 : 112). Langkah awal pelaksanaan metode analisis deskriptif ini adalah menyiapkan kerangka berfikir dan pembahasan berdasarkan referensi yang ada. Selanjutnya data yang diperoleh diklasifikasikan dalam bentuk pola, situasi, kegiatan, pandangan, sikap, kedudukan, proses, latar belakang, kecenderungan, arah, dinamika, perhubungan dan kemungkinan yang lainnya. Klasifikasi ini diperlukan untuk melihat kedudukan pada setiap fenomena atau unsur-unsur fenomena dalam suatu struktur yang besar. Pada tahap akhir menyimpulkan semua hasil data yang terkumpul yang aktual secara obyektif apa adanya.

b. Analisis Secara Kualitatif

Data yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang begitu banyak dan masih bercampur-campur direduksi untuk memilih data

yang relevan, bermakna, mengarah pada pemecahan masalah, penemuan dan pemaknaan guna menjawab rumusan masalah. Setelah data direduksi, ditentukan data yang terfokus untuk diamati lalu dibentangkan/*display*. Kemudian data tersebut direduksi lagi untuk menyederhanakan, menyusun secara sistematis hal-hal yang pokok dan penting guna membuat abstraksi yang tajam dan bermakna dari hasil temuan di lapangan. Langkah selanjutnya adalah menyusun data dalam satuan-satuan, katagorisasi dan memberikan makna/menafsirkan data itu.

1) Pomrosesan Satuan (*Unitying*)

Pemrosesan data menjadi satuan (*unitying*) adalah proses menjadikan data sebagai bagian terkecil yang bermakna utuh dan dapat berdiri sendiri terlepas dari bagian yang lain. Satuan ini dapat berupa kalimat sederhana maupun paragraf penuh. Satuan ini diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan maupun dokumentasi. Satuan ini agar mudah diidentifikasi perlu dimasukkan ke dalam kartu indeks dengan susunan yang dapat dipahami oleh orang lain.

2) Katagorisasi

Katagorisasi ini disusun berdasarkan kreteria tertentu. Mengatagorisasi-kan data yang diperoleh/kejadian yang terjadi di lapangan berdasarkan namanya, fungsinya atau kreteria yang dibutuhkan. Pada tahap katagorisasi ini dimulai dengan mencari ciri-ciri setiap katagori. Dalam memasukkan data yang diperoleh/kejadian yang terjadi di lapangan pada katagorisasi ini berdasarkan cirinya sekaligus diuji ketepatan ciri tersebut pada katagori.

3) Pemaknaan/Penafsiran Data

Pemaknaan/penafsiran data yaitu proses memberikan makna/arti (menafsirkan) data yang diperoleh di lapangan. Data yang diperoleh di lapangan akan dicari latar belakang dan konteksnya agar dapat diketahui konsep atau gagasannya yang lebih jelas. Pada pemaknaan ini dituntut adanya kemampuan integratif dari aspek indriawi, daya pikir dan akal budi. Pemaknaan ini diharapkan dapat menjangkau yang empirik, etik maupun yang transendental. Dengan kata lain dari sesuatu yang muncul sebagai empirik akan dicoba dicari kesamaan, kemiripan, kesejajaran, dalam arti individual, pola, proses, latar belakang, arah, dinamika dan kemungkinan yang lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini dibagi menjadi empat bab. Pada bab pertama yang merupakan pendahuluan memuat : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab dua menyampaikan tentang gambaran umum Lapas klas II A Yogyakarta yang terdiri dari letak geografi, bangunan Lapas, petugas pembina Lapas, perkembangan dari waktu ke waktu Lapas dan keberadaan warga binaannya. Pada bab tiga menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya yang meliputi laporan pelaksanaan penelitian, penyajian dan analisis data. Pada bab empat menyampaikan penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran.